

PENGARUH KEMISKINAN, TINGKAT PENGANGGURAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP IPM DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI 2014-2019

Uli Mutia Febrianti¹
I Wayan Wenagama²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali,
Indonesia

ABSTRAK

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur kesejahteraan manusia dilihat dari tiga indikator, yaitu Kesehatan, Pendidikan, dan Standar hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan secara parsial dan simultan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2014-2019. Penelitian ini dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dengan metode pengumpulan data dilakukan secara observasi non partisipan dan teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda dengan jumlah pengamatan sebanyak 54 pengamatan dari 8 Kabupten dan 1 Kota di Provinsi Bali dalam kurun waktu 6 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan penelitian secara parsial variabel kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM, sedangkan variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2014-2019.

Kata kunci : *Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia.*

ABSTRACT

Human Development Index (HDI) measures human welfare in terms of three indicators, namely Health, Education, and Standards of Living. The purpose of this study was to determine the effect of poverty, unemployment rate and education level partially and simultaneously on HDI in the Regency/City of Bali Province in 2014-2019. This research was conducted in all regencies/cities of Bali Province using secondary data from the Bali Province Central Statistics Agency with the method of collecting data by non-participant observation and the analysis technique used was Multiple Linear Regression with a total of 54 observations from 8 regencies and 1 city in Bali Province within 6 years. The results showed that poverty, unemployment rate and education level simultaneously had a positive and significant effect on HDI, while the partial study of poverty and unemployment variables had a negative effect on HDI, while the education level variable had a positive effect on poverty in the Regency/City of Bali Province in 2014. -2019.

Keywords: Poverty, Unemployment Rate, Education Level, Human Development Index.

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan subjek dan objek pembangunan dalam suatu negara. Sumber daya manusia dikatakan sebagai subjek

pembangunan karena manusia atau penduduk sebagai pelaku dalam pembangunan tersebut. Sementara, dikatakan sebagai objek karena manusia ditempatkan sebagai sasaran dari pembangunan suatu negara tersebut. Sumber daya manusia merupakan faktor yang terpenting dalam pelaksanaan pembangunan bagi suatu negara. Oleh sebab itu, jumlah dan kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses pembangunan. Sumber daya manusia yang melimpah merupakan penggerak pembangunan. Sedangkan, sumber daya manusia yang berkualitas merupakan penentu berhasilnya pembangunan. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kapasitas dasar yang dimaksud menurut Todaro (2003) yang sekaligus merupakan tiga nilai pokok keberhasilan pembangunan ekonomi adalah kecukupan (*sustenance*), jati diri (*selfsteem*), serta kebebasan (*freedom*).

Untuk mewujudkan tercapainya ketiga unsur tersebut, dilakukan upaya konkrit dan berkesinambungan. Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Tujuan dari pembangunan sumber daya manusia telah dibahas dalam skala internasional yang disebut dengan SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang disepakati kepala negara dan perwakilan dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditetapkan pada tahun 2015 dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola

yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Keberhasilan suatu pembangunan manusia tidak lepas dari adanya campur tangan pemerintah atau kinerja pemerintah dalam menciptakan peraturan atau regulasi. Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Hariwan,2015). IPM juga berfungsi memberikan tuntunan menentukan prioritas dalam merumuskan kebijakan dan menentukan program (Budiriyanto, 2011). Pemerintah memiliki peran dalam pembangunan manusia yaitu dengan cara melalui pengeluaran pemerintah sektor publik yaitu pada anggaran di bidang kesehatan untuk dapat meningkatkan angka harapan hidup maupun untuk menurunkan angka kematian. Pada bidang pendidikan dapat digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga dapat meningkatkan angka melek huruf. Kemudian pada pengeluaran pemerintah seperti belanja modal yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur untuk bisa meningkatkan pendapatan rill perkapita (Baeti, 2013). IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (*longetivity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut :

- (1). Rendah dengan nilai $IPM < 50$
- (2). Menengah bawah dengan nilai IPM antara 50 sampai dengan 66
- (3). Menengah atas dengan nilai IPM antara 66 sampai 80
- (4). Atas dengan nilai $IPM \geq 80$

Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah, hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut

masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketertinggalannya. Begitu juga jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria menengah, hal ini berarti pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan. Adapun tiga indikator yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, yaitu: 1) Indikator kesehatan, 2) Indikator pendidikan, dan 3) Indikator ekonomi. Pendidikan dan Kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Menurut Meier dan Rauch (dalam Aloysius Gunadi Brata, 2002, Hal. 4) pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak.

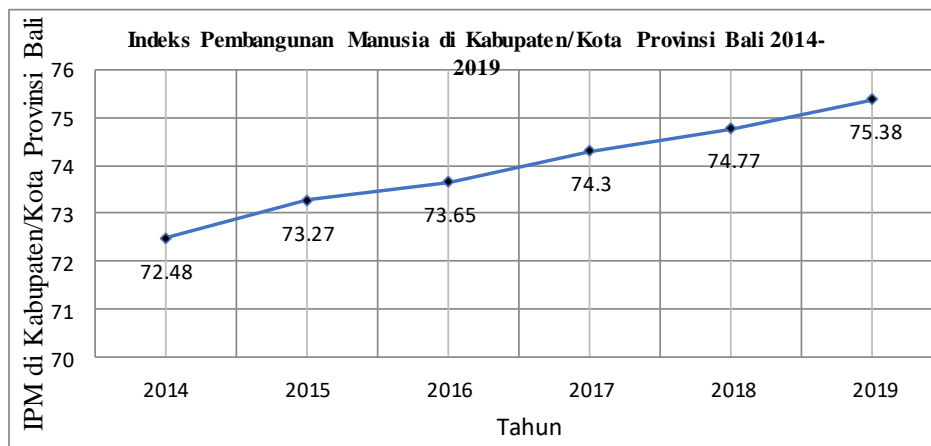
Pembangunan manusia di Indonesia pada saat ini masuk dalam kategori menengah atas dan memerlukan peningkatan agar menciptakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata bagi semua masyarakat Indonesia (Kaur,2016). Menurut (Ginting, 2008) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi dibidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka (Budhi,2013). Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut. Tinggi-rendahnya pembangunan manusia dapat dilihat dari *Human Development Index* (HDI) atau yang lebih dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Pencapaian pembangunan manusia dalam suatu negara mencakup tiga dimensi pembangunan manusia yaitu

umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak dapat digambarkan dalam IPM (Silva,2014). Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara dimana pembangunan suatu negara tidak bisa dikatakan berhasil apabila hanya melihat dari besarnya pendapatan domestik bruto saja tanpa meningkatkan pembangunan manusianya. Sering kali tingginya pendapatan domestik bruto suatu negara tidak diimbangi dengan tingkat pembangunan manusia yang sejalan pula. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat yang diakibatkan oleh kesenjangan tingkat ekonomi masing-masing kelompok masyarakat (Dalamagas,2010).

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal (Miranti,2010). Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah: Pertama, banyak negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan. Kedua, banyak negara maju yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah-masalah sosial, seperti: Penyalahgunaan obat, HIV AIDS, alkohol, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, beberapa negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mampu menggunakan secara bijaksana semua sumber daya untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia.

UNDP tahun 2019 menginformasikan bahwa IPM Indonesia berada pada peringkat 6 dari 11 negara di tingkat ASEAN. Kajian seksama masih perlu tetap dilakukan mengingat IPM Indonesia ternyata masih berada di bawah Negara-negara *Regional Asociation of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yaitu Malaysia yang menempati peringkat 3,

Singapura peringkat 1, Thailand pada peringkat 4, dan Brunei Darussalam di posisi 2. IPM Indonesia hanya lebih baik bila dibandingkan dengan IPM Myanmar yang menduduki posisi 10, Vietnam 7, Kamboja 11, dan Timor Leste pada posisi 8. Hal tersebut menunjukkan masih diperlukannya upaya keras untuk memperbaiki kualitas manusia Indonesia di tengah-tengah persaingan dengan masyarakat internasional. Upaya meningkatkan IPM Indonesia tentunya tidak dapat dilepaskan dari usaha simultan untuk meningkatkan IPM kabupaten/kota di Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Bali, perkembangan IPM kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2014-2019 dapat disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2014-2019 dalam persen

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 (Data diolah)

Data IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dari tahun 2014-2019 seperti ditunjukkan di gambar 1.1 mengalami peningkatan, yaitu dari 72,48 pada tahun 2014 menjadi 75,38 pada tahun 2019. Namun jika dilihat lebih seksama peningkatan IPM Provinsi Bali cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014, dimana peningkatan IPM Provinsi Bali tahun 2014 ke 2015 sebesar 0,79 sedangkan peningkatan IPM Provinsi Bali tahun 2018 ke 2019 sebesar 0,61. Jika dibandingkan dari tahun ke tahun, peningkatan IPM Provinsi Bali ternyata tidak konsisten.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan yang dimiliki pemerintah Provinsi Bali belum optimal digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM. Peningkatan IPM, ditentukan oleh meningkatnya pendidikan dan ekonomi. Bidang pendidikan yaitu antara lain meningkatnya angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dalam bidang ekonomi yaitu berkurangnya kemiskinan dan pengangguran (Yasa,2015).

Menurut Ravallion (2001), kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan (Kemenuh dan Wenagama, 2017). Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi (Darmawan dan Wenagama, 2017). Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan (Mirza,2012). Hal tersebut menjadikan gap pembangunan manusia diantara keduanya pun menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasikan dengan baik. Di sisi lain, kurangnya sumber daya akan menyebabkan kemiskinan karena sumber daya alam adalah sumber utama kebutuhan hidup manusia. Kemiskinan

sumber daya merupakan sebab dan sekaligus akibat kemiskinan manusia (Jhingan, 2012:34). Banyaknya angka kemiskinan dapat berakibat pada banyaknya angka pengangguran.

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya (Sukirno, 2008). Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak digolongkan sebagai pengangguran. pengangguran akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat dan tentunya mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang telah di capai seseorang. Semakin turun tingkat kesejahteraan seseorang maka meningkatnya peluang terjebak kepada Indeks Pembangunan Manusia yang rendah. Tidak hanya itu tingginya angka pengangguran juga akan mengganggu kestabilan sosial dan politik suatu negara. Masalah pengangguran tidak hanya menimbulkan permasalahan sosial namun juga akan menimbulkan kekacauan politik. Jika ini terjadi maka keinginan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia baik jangka menengah maupun jangka panjang akan sulit untuk diwujudkan (Sukirno, 2004). Dari tahun ke tahun pengangguran mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia karena indikator keberhasilan dalam pembangunan salah satunya adalah mampu mengangkat kemiskinan dan mengurangi pengangguran secara signifikan, apalagi di era globalisasi ini persaingan tenaga kerja semakin ketat terutama karena dibukanya perdagangan bebas yang memudahkan penawaran tenaga kerja asing yang kini lebih berkualitas masuk ke dalam negeri.

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting bagi proses pembangunan karena berkenaan dengan pengetahuan dan keterampilan manusia (Purnami, 2016). Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata terdapat daerah dengan pembangunan yang cepat dan daerah dengan pembangunan yang lambat, dimana

ketidakmerataan pembangunan akan berpengaruh buruk terhadap kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah (Hariwan dan Swaningrum, 2015). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional juga telah menyebutkan bahwa pendidikan diarahkan untuk mengembangkan segenap potensi yang ada pada diri peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Elemen pendidikan sangat penting dan bermakna bagi seseorang guna menggapai masa depan yang cerah dan baik, maka dari itu seharusnya pendidikan diberikan sejak dini mungkin pada seseorang, baik itu berupa pendidikan formal maupun informal. Pendidikan akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga dapat menciptakan produktivitas kerja (Inda Arfa, 2017).

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian Nursiah dan Yusbar (2014) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM. Secara parsial (Kusuma,2016). Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM sedangkan Upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM. Artinya setiap meningkatnya upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan IPM. Hasil penelitian Rizaldi (2018) diperoleh informasi bahwa Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel Pengangguran dan variabel Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Ridwan

dan Maulana (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat mendorong terciptanya infrastruktur yang menjadi pemicu banyaknya industri, fasilitas publik seperti pendidikan dan rumah sakit yang akan mendorong tingginya indeks pembangunan manusia (Yusuf,2015). Hubungan antara pendidikan dengan kualitas hidup adalah semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi IPM namun, teknologi tidak berpengaruh signifikan. Sementara itu hasil penelitian yang kontradiktif ditemukan oleh Nofrian (2018) yang menemukan bahwa variabel kemiskinan dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, menyebabkan penelitian tentang IPM semakin menarik dan penting untuk dikaji khususnya faktor-faktor yang diduga memiliki kontribusi terhadap peningkatan IPM. Salah satunya faktor kemiskinan dan pengangguran, serta adanya dugaan bahwa kemiskinan dan pengangguran tidak serta merta meningkatkan IPM. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap IPM di kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) Untuk menganalisis pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali. 2) Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali. 3) Untuk mengetahui variabel dominan antara kemiskinan, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Lokasi penelitian ini dilakukan di kabupaten/kota Provinsi Bali yaitu, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar. Data yang digunakan mencakup data yang berada di kabupaten/kota di Provinsi Bali secara tahunan yang diambil dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Alasan dipilihnya kabupaten/kota di Provinsi Bali karena ketidakmerataan pembangunan sehingga di beberapa Kabupaten/Kota masih terdapat masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan rendah sehingga kesulitan untuk mendapat pekerjaan yang berakibat terhadap rendahnya indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Definisi Operasional Variabel

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM yang digunakan dalam penelitian ini adalah IPM metode baru, yaitu dihitung dari rata-rata indeks kesehatan yang diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), indeks pendidikan yang diukur dari Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan indeks pengeluaran yang diukur dengan Produk Nasional Bruto (PNB) masyarakat. Variabel ini dinyatakan dalam satuan indeks.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Data yang digunakan merupakan data kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2014-2019 yang diambil dari badan pusat statistik dan diukur dalam satuan persen.

Tingkat Pengangguran dalam penelitian ini merujuk pada penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Data variabel tingkat pengangguran didalam penelitian ini diperoleh dari BPS dan dinyatakan dalam persen selama tahun 2014–2019.

Tingkat Pendidikan adalah Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Terdapat tiga jalur pendidikan meliputi pendidikan formal, pendidikan nonformal dan informal, serta perguruan tinggi. Data yang digunakan merupakan data rata-rata lama sekolah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2014-2019 yang diukur dengan satuan tahun.

Kerangka Konseptual

Permasalahan rendahnya kualitas sumber daya manusia masih terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh masih tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dicapai oleh masyarakat sehingga menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Rendahnya kualitas sumber daya manusia terlihat dari capaian nilai indeks pembangunan manusia yang rendah bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Kemiskinan merupakan kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang di alami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Pengentasan penduduk miskin masih menjadi salah satu tujuan utama pembangunan nasional. Meskipun sudah banyak program kemiskinan yang ditujukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, tetapi kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Sulitnya penyelesaian masalah ini salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hubungan kemiskinan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia telah dijelaskan oleh Suparmono (2004). Penelitian yang

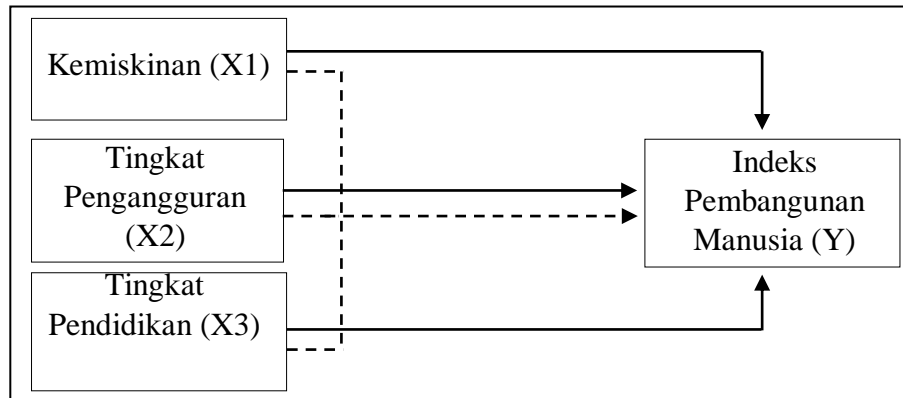
dilakukan oleh Mirza (2012) menunjukkan bahwa Kemiskinan mempunyai pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia dimana bila terjadi penurunan tingkat kemiskinan maka indeks pembangunan manusia akan meningkat.

Faktor yang juga menjadi penyebab kemiskinan adalah tingkat pengangguran. Hubungan antara pengangguran dengan tingkat kemiskinan juga didukung oleh teori lingkaran setan kemiskinan versi nurkse yang menggambarkan rendahnya produktivitas sebagai salah satu penyebab kemiskinan. Menurut Algis Sileika (2013) mengatakan bahwa pengangguran secara langsung dipengaruhi oleh kemiskinan. Selanjutnya, hasil penelitian yang dikemukakan oleh Astriani dan Purbadharmaja (2013) menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan yang artinya semakin tinggi tingkat pengangguran maka kemiskinan akan meningkat.

Pendidikan dapat mempengaruhi kemiskinan karena semakin tinggi pendidikan seseorang akan mampu mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat menambah pendapatan seseorang. Pendidikan merupakan investasi yang dapat menunjang kesuksesan ekonomi pada suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan menunjang tingkat kemakmuran masyarakat dan akan dapat menekan angka kemiskinan. Menurut Rahmawati (2006), kondisi kemiskinan dapat juga di sebabkan karena pendidikan yang rendah. Pervez Zamurrad Janjua (2011), menyatakan pendidikan selalu dianggap sebagai alat yang dominan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui peningkatan produktivitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada bab 1, penelitian ini menganalisis pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan terhadap IPM. Hal tersebut dapat terlihat dari variabel dependen penelitian ini yakni Indeks

Pembangunan Manusia (Y), sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemiskinan (X1), tingkat pengangguran (X2) dan tingkat pendidikan (X3). Untuk menjelaskan hubungan variabel-variabel dalam penelitian ini, tergambar melalui kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 2 Kerangka Konseptual Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan Tingkat pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Keterangan :

- Pengaruh X₁, X₂, X₃ secara parsial terhadap Y
 - - - - - ► Pengaruh X₁, X₂, X₃ secara simultan terhadap Y

Teknik analisis

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel kemiskinan, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali. Analisis ini juga dapat mengukur besarnya dan arah dari pengaruh tersebut serta mengukur derajat keeratan pengaruh diantara satu variabel atau lebih variabel bebas (Wirawan, 2002: 293). Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y_t = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Yt = Indeks Pembangunan Manusia
- X1 = Kemiskinan
- X2 = Tingkat Pengangguran
- X3 = Tingkat Pendidikan
- α = Konstanta (nilai Y' apabila X1, X2.....Xn = 0)
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi dari masing-masing X
- e = *error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen (Variabel Kemiskinan, Variabel Tingkat Pengangguran dan Variabel Tingkat Pendidikan) terhadap variabel dependen (Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2014-2019). Model ini digunakan untuk mengasumsikan adanya hubungan linear antara variabel dependen dengan masing-masing variabel independennya. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	56,211	4,309		13,046	0,000
	Kemiskinan	-0,653	0,352	-0,202	-1,857	0,068
	Pengangguran	-0,139	0,276	-0,021	-0,503	0,617
	Pendidikan	2,530	0,358	0,771	7,059	0,000

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 1 dapat dibuat persamaan struktural sebagai berikut :

$$Y : 56,211 - 0,653 X_1 - 0,139 X_2 + 2,530 X_3$$

$$SE : (4,309)(0,352) (0,276) (0,358)$$

$$Sig : (0,000) (0,068) (0,617) (0,000)$$

Hasil ini menunjukkan bahwa :

Nilai Koefisien regresi variabel Kemiskinan (X1) dan Tingkat Pendidikan (X3) memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini berarti variabel Kemiskinan (X1) dan Tingkat Pendidikan (X3) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Sedangkan Tingkat Pengangguran (X2) memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang berarti Tingkat Pengangguran (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residualnya memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah sampel pengujian berdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan uji statistic *Kolmogorov-Smirnov* dengan melihat nilai signifikansi *Monte Carlo (2-tailed)*. Apabila dalam pengujian *Kolmogorov – Smirnov* nilai yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 maka residual berdistribusi normal ($sig > 0,05$), sedangkan apabila nilai yang dihasilkan kurang dari 0,05 maka mengindikasikan distribusi data yang tidak normal. Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4.6 bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov (KS)* sebesar 0,110 dan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,057 Hal tersebut mengindikasikan bahwa model persamaan regresi berdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari nilai α 0,05. Berdasarkan hasil grafik *p-p plot* diperoleh hasil bahwa data menyebar disekitar garis diagonal atau grafik

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Menurut ghozali (2016) autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Untuk menguji apakah terdapat autokorelasi atau tidak menggunakan *Run Test*. Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi run test diatas diperoleh hasil Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 1,919. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar $1,919 > 5\%$ (0,05). Sehingga H_0 diterima, dan data sudah berdistribusi normal tanpa adanya autokorelasi.

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji suatu model regresi apakah terdapat korelasi antar variabel bebas (*independen* atau tidak). Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari besar nilai VIF yang lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,01. Variabel Kemiskinan mempunyai nilai VIF sebesar $8,607 < 10$ dan nilai *tolerance* sebesar $0,116 > 0,10$, maka tidak terjadi multikolinearitas. Variabel Pengangguran mempunyai nilai VIF sebesar $1,312 < 10$ dan nilai *tolerance* sebesar $0,762 > 0,10$, maka tidak terjadi multikolinearitas. Variabel Tingkat Pendidikan mempunyai nilai VIF sebesar $8,708 < 10$ dan nilai *tolerance* sebesar $0,115 > 0,10$, maka tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji suatu model regresi apakah terjadi ketidaksamaan *variance* atau residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas karena data menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran. Salah satu cara untuk mendeteksi

ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat melalui uji statistik yang bernama Uji *Rank Spearman* dengan mengoreksikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Nilai signifikan variabel kemiskinan sebesar 0,454, nilai signifikan variabel pengangguran sebesar 0,352, nilai signifikan variabel pendidikan sebesar 0,309. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas karena masing-masing variabelnya mempunyai nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05.

Pembahasan Hasil Penelitian

Uji Koefisien Determinasi

Nilai *adjusted R Square* adalah sebesar 0,919. Ini berarti naik turunnya Indeks Pembangunan Manusia dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan sebesar 91,9% sedangkan sisanya sebesar 8,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimunculkan di dalam model penelitian ini.

Uji Signifikansi Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji f)

Uji f digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (kemiskinan, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan) dengan variabel terikat (Indeks Pembangunan manusia kabupaten/kota Provinsi Bali) secara bersama-sama (simultan). Uji f dilakukan dengan membandingkan antara F hitung dengan F tabel pada tingkat signifikan 0,05. Dengan taraf nyata (α) = 0,05; $F_{tabel} = 2,78$, $F_{hitung} = 223,530$ dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan demikian maka $F_{hitung} = 223,530 > 2,78$ dan nilai signifikan $0,000 < (\alpha) = 0,05$ ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan, tingkat pengangguran dan pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kemiskinan, tingkat

pengangguran dan tingkat pendidikan diikuti dengan perubahan indeks pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Uji Signifikansi Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing koefisien regresi sehingga dapat diketahui hubungan variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Pengaruh Kemiskinan (X1) terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Variabel kemiskinan secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2014-2019. Berdasarkan hasil data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan variabel kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia yang artinya ketika variabel kemiskinan mengalami kenaikan akan mengakibatkan penurunan terhadap indeks pembangunan manusia. Jika permasalahan kemiskinan tidak segera diatasi dan semakin meningkat dapat berakibat pada ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan akan menciptakan lingkaran setan kemiskinan, dimana rendahnya pendapatan masyarakat akan berakibat pada rendahnya permintaan sehingga tingkat investasi juga rendah dan mengurangi produktivitas. Produktivitas masyarakat yang rendah dapat berakibat pada ketidakmampuan untuk memperoleh pendidikan sehingga terciptalah penduduk yang terbelakang dan buta huruf, banyaknya masyarakat yang terbelakang dan buta huruf dapat menjadi faktor yang menghambat pembangunan manusia.

Menurut Suradi(2007) dalam Mirza (2012) yang menyatakan bahwa kemiskinan berkaitan erat dan ikut menentukan proses pembangunan yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Paradigma yang kini bergeser dari dominasi peran negara kepada peran masyarakat tidak akan dapat diwujudkan apabila jumlah penduduk miskin masih cukup signifikan. Hal demikian dikarenakan pada umumnya penduduk miskin lebih banyak menghabiskan tenaga dan waktunya memenuhi kebutuhan dasar. Mereka tidak tertarik untuk melibatkan diri pada aktivitas – aktivitas yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kemiskinan absolut yang menyatakan penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, penduduk hidup dibawah pendapatan riil minimum atau dapat dikatakan hidup di bawah kemiskinan internasional (Todaro dan Smith, 2006).

Pengujian pengaruh Tingkat Pengangguran (X_2) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Vriabel pengangguran secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2014-2019. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, variabel pengangguran memiliki pengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Artinya ketika variabel pengangguran mengalami kenaikan maka indeks pembangunan manusia mengalami penurunan, hal ini terjadi karena ketika tingkat pengangguran meningkat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun dikarenakan berkurangnya pendapatan yang menjadi faktor dominan dalam meningkatkan pembangunan manusia, sehingga masyarakat yang tidak memiliki pendapatan tidak bisa memenuhi kehidupannya sehari-hari dan memperbaiki kualitas diri dalam hal pendidikan maupun kesehatan.

Menurut Feriyanto (2014) Pengangguran juga mengakibatkan pendapatan mereka berkurang. Pendapatan dalam hal ini merupakan faktor yang dominan dalam peningkatan pembangunan manusia. Penelitian ini sejalan dengan pengan penelitian Menurut Baeti (2013) yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. Pengangguran berkaitan erat dengan kualitas pembangunan manusia. Jumlah pengangguran yang tinggi akan mengakibatkan kemakmuran kehidupan masyarakat akan berkurang.

Pengaruh langsung Tingkat Pendidikan (X3) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Variabel tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2014-2019. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan variabel pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, yang artinya ketika variabel pendidikan meningkat maka variabel indeks pembangunan manusia juga ikut meningkat. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang maka pengetahuan dan keahlian yang didapatkan juga akan meningkat sehingga memudahkan dalam mencari pekerjaan dan produktivitas kerjanya juga akan meningkat. produktivitas kerja tinggi yang dimiliki seseorang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan (Seran,2017). Oleh sebab itu, pendidikan merupakan modal awal dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan baik.

Variabel yang berpengaruh dominan

Berdasarkan nilai koefisien beta variabel tingkat pendidikan yang memiliki nilai paling tinggi yakni sebesar 0,771, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan yang memiliki pengaruh dominan terhadap indeks pembangunan manusia dibanding dengan kemiskinan dan tingkat pengangguran.

SIMPULAN

1. Kemiskinan, tingkat pengangguran, dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Apabila terjadi peningkatan kemiskinan, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan maka akan memberi dampak pada perubahan nilai indeks pembangunan manusia.
2. Kemiskinan yang meningkat akan menurunkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Penduduk miskin yang terus meningkat merupakan salah satu ciri dari rendahnya pendidikan, kesehatan dan rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk sehingga berakibat pada rendahnya pembangunan manusia.
3. Tingkat Pengangguran yang meningkat juga akan menurunkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Semakin tinggi tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Bali maka akan berakibat pada berkurangnya tingkat kemakmuran masyarakat yang disebabkan oleh pendapatan mereka yang berkurang, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Tingkat Pendidikan yang meningkat akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Pendidikan berperan dalam meningkatkan kemampuan dalam menyerap teknologi modern, selain itu pendidikan juga modal dalam membentuk manusia yang produktif, berpengetahuan, mempunyai keterampilan dan kemampuan. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam pencapaian hasil pembangunan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang di dapat, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah memberikan bantuan yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran penduduk miskin, contohnya dengan memberikan bantuan sembako, program jaminan kesehatan serta program KUR (Kredit Usaha Rakyat) sehingga pendapatan masyarakat dapat dipergunakan untuk membiayai kehidupan dan dapat keluar dari jurang kemiskinan.
2. Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Bali sebaiknya melakukan pelatihan dan mengadakan pameran produk lokal dengan tujuan memberikan keterampilan dan memberikan tempat untuk memasarkan hasil karyanya diharapkan dapat terjadi permintaan dan penawaran pasar sehingga meningkatkan perekonomian dengan membuka lapangan kerja dan dapat menyerap tingkat pengangguran.
3. Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan pendidikan seharusnya meningkatkan pendidikan di daerah terpencil dengan cara memfasilitasi pendidikan bagi masyarakat miskin seperti sekolah gratis bagi masyarakat miskin sehingga kualitas sumber daya manusia dapat meningkat dan akan berpengaruh pada peningkatan indeks pembangunan manusia.

REFRENSI

- Algis Sileika dan Jurgita Bakeryte. 2013. Theoretical Issues of Relationship Between Unemployment Povert and Crime in Sustainable Development. *Jurnal of Security and Sustainability Issues*. 2(3), h: 64-65.
- Astrini, Myanti dan IB Putu Purbadharmaja. 2013. Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi

- Bali. *Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Baeti, N. 2013. Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, Volume 2, No.3, Hal 85-98.
- Budhi, Made Kembar Sri. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6 (1), hal.1-6.
- Ade Cahyat. 2004. "Bagaimana Kemiskinan Diukur? Beberapa Model Kemiskinan di Indonesia". Paper disajikan pada Center for International Forestry Research. Bogor.
- Darmawan, Agus Pande dan I Wayan Wenagama, 2017. Pengaruh Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 6(10), pp. 1868-2101.
- Dalamagas, Basil. 2010. Publik Sector and Economic Growth: The Greek Experience. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 32. Hal:277-288
- Eka Putra, Nofrian. 2018. *Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi*. Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta
- Hariwan, Peggy dan Ayu Swaningrum. 2015. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8 (1), hal.72-82.
- Kaur, Masjinder. 2016. Knowledge in the Economic Growth of Developing Economies. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 8(2).
- Kemenuh, Ida Bagus Adi Mahaputra dan I Wayan Wenagama, 2017. Efektivitas dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) Terhadap Pendapatan Keluarga KK Miskin. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.6(9), pp. 1628-1867.
- Kusuma, Hendra. 2016. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9 (1): 1-11.
- Marisca, Haryadi. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jambi. *Jurnal Prespektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah. Jambi*.
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal UNNES*. 1(1). November 2012: 1-15

- Miranti, Riyana. 2010. Poverty in Indonesia 1984-2002:the impact of growth and changes in inequality. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 46 (1), pp.79-97.
- Mustika, C. 2011. Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008. *Jurnal Paradigma Ekonomika vol 1 no 4. Universitas Jambi. Jambi.*
- Nur Baeti. 2013. Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Economic Development Analisis Journal. Semarang : Universitas Negeri Semarang. Semarang.*
- Nurkse, Ragnar. 1961. Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. *Oxford University Press. New York*
- Ravallion,Martin. 2001. *Poverty Comparisons*. World bank. New York
- Ridwan Maulana, Prasetyo Ari Bowo. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Di Indonesia 2007-2011. *Jurnal Of Economics And Policy*. Universitas Negeri Semarang. Semarang
- Silva, Indunil De and Sudarno Sumarto. 2014. Does Economic Growth Really Benefit The Poor? Income Distribution Dynamics and Pro-Poor Growth in Indonesia. *Bulletin of Economic Indonesian Studies*, 50 (2), pp.227-242.
- Seran, Srilius. 2017. Hubungan antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 10(2). Halaman: 59-71.
- Verner. Dorte. 2006. Rular Poor in Rich Rular Areas: Poverty in Rular Argentina. *World Bank Policy Research Working Paper 4096*.
- Yasa, I Komang Oka Artana dan Sudarsana Arka. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 63-71.
- Yusuf, Arief Anshory and Andy Sumner. 2015. Growth, Poverty and Inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51 (3), pp.323-348.